

Buku :

- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Z., 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bram, Deni, 2014, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- HS, Salim dan Nurbani, E. S. 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Karya, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

1) Artikel Jurnal :

- Muhdar M., “Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *MIMBAR HUKUM* Vol. 21, No. 1, Februari 2009.
- Murdjito, Gatot, “Pemanfaatan Limbah Tahu (Air Tahu) sebagai Komporan Sapi Penggemukan dan Pendapatan Pengusaha Tahu di Pedesaan”, *Buletin Peternakan* Vol. 19, Juni 1995.
- Winarni, Fajar, “Penggunaan Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan” *MIMBAR HUKUM* Vol. 20, No. 1, Februari 2008.

2) Hasil Penelitian/Tugas Akhir :

- Effendy, Arief, 2018, *Usaha Produksi Tahu di Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam Perspektif Fetisisme Komoditas Marxian*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Irwanto Robert, 2011, *Pengaruh Pembuangan Limbah Cair Industri Tahu terhadap Kualitas Air Sumur di Kelurahan Krobokan Kota Semarang*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Hafid, M T., 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial*, Skripsi, Sarjana Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.

3) Internet :

- Enggran Eko Budianto /Detik News “Duh, 67 Industri Tahu di Jombang Buang Limbah ke Sungai” <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5267095/duh-67-industri-tahu-di-jombang-buang-limbah-ke-sungai> , diakses 26 November 2020
- Jimly Asshiddiqie , “Penegakan Hukum”, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) , diakses pada 1 Desember 2020.
- Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang, “Infografis” , <https://103.142.14.56/kominfo/jcc/beranda/infografis.html>, diakses pada 2 September 2020.
- Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang, “Keadaan Ekonomi”, <https://jombangkab.go.id/pages/keadaan-ekonomi>, diakses pada 2 September 2020.

Desa Sumbermulyo”, <https://mediapetisi.net/2019/11/07/meriah-grebek-tahu-jombang-tahun-2019-di-desa-sumbermulyo/>, diakses 26 November 2020.

4) Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

- **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :**

P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5) Putusan Pengadilan :

- Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 199/Pid.B/L.H/2019/PN Mjy perihal perkara pidana lingkungan Prasetyo Agung Basuki Bin Manto 12 Februari 2020.